



APBD 2018

Penyerapan Capai 12,17%

JOGJA—Hingga triwulan I/2018 penyerapan anggaran belanja langsung Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja baru mencapai 12,17%. Dari total belanja langsung sebesar Rp940 miliar tahun ini, selama Januari-Maret baru terserap Rp104,5 miliar.

Abdul Hamid Razak
hamid@harianjogja.com

APBD KOTA JOGJA

Pendapatan daerah: Rp1,623 triliun.

- Pendapatan asli daerah: Rp551 miliar.
- Dana perimbangan: Rp912 miliar.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp159 miliar.

Belanja daerah: Rp1,691 triliun.

- Belanja tidak langsung: Rp755 miliar.
- Belanja langsung: Rp935 miliar.

Rekap anggaran belanja

- a. Pelayanan Umum: sebesar Rp.449 miliar (26,55%)
- b. Ketertiban dan Ketentraman: Rp.38 miliar (2,30%)
- c. Ekonomi: Rp.178 (10,55%)
- d. Lingkungan Hidup: Rp.67 miliar (3,99%)
- e. Perumahan dan fasilitas Umum: Rp.148 miliar (8,79%)

sumber: APBD Kota Jogja

Dari total belanja langsung sebesar Rp940 miliar tahun ini, selama Januari-Maret baru terserap Rp104,5 miliar.

Salah satu faktor naiknya penyerapan APBD Pemkot Jogja, diakui oleh Kepala BKAD Jogja lantaran penerapan kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan meski baru sekitar 12%, tetapi dia mengklaim capaian penyerapan tiga bulan pertama itu lebih baik dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Diakui, capaian itu sesuai dengan alur yang direncanakan.

Menurut Kadri, penyerapan di atas 10% pada triwulan pertama sudah lebih baik lantaran alur penyerapannya sudah sesuai target. Sejak awal pihaknya memang merencanakan pada triwulan pertama, grafiknya datar, pada triwulan kedua mulai meningkat dan triwulan III penyerapannya lebih meningkat. Barulah pada triwulan keempat datar lagi.

"Itu yang kami harapkan. Kalau triwulan I tahun ini, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dari sisi target ada deviasi tapi tidak signifikan," katanya kepada wartawan, Selasa (3/4).

Dia mengatakan salah satu faktor naiknya penyerapan APBD Pemkot Jogja lantaran penerapan kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Pemberian tunjangan itu, kata dia, didasarkan pada penilaian pegawai yang meliputi tingkat kehadiran dengan bobot 60%; penilaian pegawai berbobot 20%; serta capaian kinerja organisasi dengan bobot 20%.

Disinggung soal anggaran, Pemkot diakuinya telah mengalokasikan pembayaran TPP berbasis kinerja setiap bulannya mencapai sekitar Rp20 miliar.

"Jadi PNS lebih rajin karena ada TPP. Kinerja meningkat, tambah rajin dan lebih disiplin," ujarnya.

Kabid Anggaran BKAD Jogja Tugiyarto mengatakan setiap bulan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki rancangan penyerapan anggaran. Setiap tiga bulan diakuinya juga ada evaluasi anggaran dan kinerja di masing-masing OPD tersebut.

"Mereka tentu ingin memenuhi rencana yang ditargetkan. Misalnya untuk triwulan I sebesar 30 persen. Kalau penyerapannya dinilai bagus maka akan berdampak pada TPP-nya," kata Tugiyarto.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005